

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut berbagai literatur sejarah, Madura tidak pernah menjadi kesatuan politik yang berdiri sendiri. Sebelum wilayah itu dimasukkan ke dalam negara kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800, dan kemudian dalam negara Indonesia, Madura terdiri dari beberapa kerajaan yang saling bersaing. Selain itu, sampai VOC muncul kerajaan-kerjaan tersebut sedikit banyak tergantung pada kerajaan-kerajaan yang lebih besar yang berpusat di pulau Jawa. Antara tahun-tahun 1100 dan 1700 berturut-turut kerajaan-kerajaan di Madura berada di bawah supremasi kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, negara-negara Islam pesisir Demak dan Surabaya, dan kerajaan Mataram di Jawa Tengah.¹

Sumenep, sebagai salah satu kota dari empat kota yang terdapat di pulau Madura merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di ujung timur pulau Jawa, perlu kita ketahui bahwa kata Sumenep berasal dari kata Soengennep. Masyarakat terpelajar yang tinggal di pusat kabupaten Sumenep umumnya menyebut dengan kata Sumenep. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan menyebutnya dengan Soengennep. Sebenarnya kata Soengennep lebih cocok dengan logat orang Madura. Kata-kata dalam, huruf "O" lebih banyak dipergunakan daripada

¹ Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 44.

huruf "U". Di dalam pararaton mencantumkan kata Soengennep untuk menyebutkan wilayah Sumenep. Hal ini menunjukkan bahwa kata Soengennep lebih awal dipergunakan daripada kata Sumenep. Pada akhirnya abad XVIII Belanda mengubah kata Soengennep menjadi Sumenep². Menurut sejarah, Sumenep merupakan daerah yang dahulu diperihat atau dipimpin oleh seorang raja. Diantara raja-raja yang pernah memimpin Sumenep, yaitu:³

1. Jaman Pemerintah Kerajaan Arya Wiraraja

Arya Wiraja dilantik sebagai Adipati pertama Sumenep pada tanggal 31 Oktober 1269, yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi Kadipaten Sumenep. Selama dipimpin oleh Arya Wiraja, banyak kemajuan yang dialami kerajaan Sumenep. Pria yang berasal dari desa Nangka Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan atau kemampuan yang baik. Arya Wiraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat atau pengatur strategi, analisisnya cukup tajam dan terarah sehingga banyak yang mengira Arya Wiraja adalah seorang dukun. Adapun jasa-jasa Arya Wiraja:

- a. Mendirikan Majapahit bersama dengan Raden Wijaya.
- b. Menghancurkan tentara Cina/tartar serta mengusirnya dari tanah Jawa.

² *Sejarah Sumenep*, disusun oleh Tim Penulis Sejarah Sumenep dalam makalah disampaikan pada seminar buku Penulisan Sejarah Sumenep yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep pada hari Rabu, 10 Desember 2003 bertempat di Pendopo Agung Sumenep

³ Ahmad Fatoni, " Sejarah Sumenep" dalam <http://Www.Sumenep.Go.Id/> (05 Mei 2012)

2. Pangeran Jokotole

Pangeran Jokotole menjadi raja Sumenep yang ke 13 selama 45 tahun (1415-1460). Jokotole dan adiknya bernama Jokowedi lahir dari Raden Ayu Potre Koneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari perkawinan bathin (melalui mimpi) dengan Adipoday (Raja Sumenep ke 12)⁴. Karena hasil dari perkawinan Bathin itulah, maka banyak orang yang tidak percaya. Dan akhirnya, seolah-olah terkesan sebagai kehamilan diluar nikah. Akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya, sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh dan diluar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya maka kelahiran bayi RA Potre Koneng langsung diletakkan di hutan oleh dayangnya. Dan, ditemukan oleh Empu Kelleng yang kemudian disusui oleh kerbau miliknya.

3. Raden Ayu Tirtonegoro Dan Bendera Saud

Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah kerajaan Sumenep sebagai Kepala Pemerintahan yang ke 30⁵. Menurut hikayat RA Tirtonegoro pada suatu malam bermimpi supaya Ratu kawin dengan Bendera Saud. Setelah Bendera Saud dipanggil, diceritakanlah mimpi itu. Setelah ada kata sepakat perkawinan dilaksanakan, Bendera Saud menjadi suami Ratu dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro.

⁴ *Sejarah Sumenep*, disusun oleh Tim Penulis Sejarah Sumenep dalam makalah disampaikan pada seminar buku Penulisan Sejarah Sumenep yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep pada hari Rabu, 10 Desember 2003 bertempat di Pendopo Agung Sumenep. Hlm 11.

⁵ *Ibid*, hlm 24.

4. Panembahan Sumolo

Bandara Saod dengan isterinya yang pertama di Batu Ampar mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bandara Saud itu datang ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua yang bernama Sumolo terlebih dahulu dalam menyungkem kepada Ratu sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya (Bandara Saud). Saat itu pula keluar wasiat Sang Ratu yang dicatat oleh sekretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kelak kemudian hari apabila Bandara Saud meninggal maka yang diperkenankan untuk mengganti menjadi Raja Sumenep adalah Sumolo. Setelah Bandara Saud meninggal 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal tahun 1762, sesuai dengan wasiat Ratu yang menjadi Raja Sumenep adalah Sumolo dengan gelar Panembahan Notokusumo I⁶.

Salah satu kerajaan yang sampai saat ini bisa dilihat ornamen peninggalannya adalah kerajaan Sumenep. Dalam *Nagarakertagama*, salah satu kekawin dari tahun 1365, terdapat ungkapan dari salah seorang penyair istana terkemuka Majapahit, bahwa seorang raja di kerajaan kecil Sumenep di Madura Timur adalah bekas pejabat pada istana Singasari. Di zaman Majapahit, beberapa keluarga kerajaan Madura memiliki hubungan keluarga dengan bangsawan istana Jawa. Para raja di pulau Madura berkewajiban menyerahkan upeti-upeti tertentu,

⁶ *Sejarah Sumenep*, disusun oleh Tim Penulis Sejarah Sumenep dalam makalah disampaikan pada seminar buku Penulisan Sejarah Sumenep yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep pada hari Rabu, 10 Desember 2003 bertempat di Pendopo Agung Sumenep, 27.

mungkin juga tenaga-tenaga kerja, kepada raja tertinggi di Jawa dan pada waktu tertentu menyatakan kesetiaan mereka, antara lain dengan memberikan pengakuan, melakukan kunjungan kehormatan, dan ikut serta dalam pesta-pesta di istana.

Sampai saat ini, hakikat-hakikat budaya dahulu seperti adat isitiadat, sopan santun, masih melekat pada jiwa masyarakat yang memiliki keturunan bangsa Kraton yang disebut keturunan Bangsawan (Darah Biru). Sedangkan arti dari golongan Bangsawan (Golongan Darah Biru) yaitu darah biru hanya kiasan kata saja, yang artinya masih ada keturunan dari kalangan ningrat atau priyayi yang ketika waktu zaman dahulu ialah kalangan bangsawan yang dianggap mempunyai derajat yang cukup tinggi dibanding kalangan lain.

Bagi masyarakat sumenep, golongan bangsawan merupakan golongan yang sangat dihormati dan disegani, bahkan hingga saat ini walaupun sebagian dari mereka yang mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan. Di samping itu, golongan bangsawan yang ikut berperan aktif dan duduk di pemerintahan kota Sumenep sangat disegani dan berkarisma. Pada pemilu, masyarakat sumenep baik dari kalangan bangsawan maupun kalangan biasa berpartisipasi secara demokratis tanpa ada diskriminasi dan mengusik antara satu dengan yang lainnya.

Ini dipertegas dengan teori partisipasi politik yang diungkapkan oleh Samuel P Huntington dalam konsepsi Miriam Budiardjo yaitu kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁷

Dari uraian teori diatas, salah satu bentuk partisipasi dalam kaitannya eksistensi Bangsawan Kadipaten Sumenep yaitu: Ada dua organisasi khusus bangsawan di Kadipaten Sumenep. Yang pertama adalah Persatuan Family Semolo (PERFAS) , ketua dan pengurusnya adalah kalangan bangsawan yang sepuh-sepuh. Yang kedua adalah Forum Silaturahmi Generasi Muda Semolo (FORSIGEMAS) yang diketuai dan semua anggotanya adalah pemuda-pemuda bangsawan. Kedua organisasi ini adalah wadah budaya karena orang-orangnya adalah pelaku sejarah. Di samping itu, organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS merupakan simbol pengganti kedudukan Raja di tengah-tengah masyarakat Sumenep. Organisasi inilah yang digunakan baik dalam hal politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 368

Deskripsi di atas telah menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang adanya peran Raden Asiruddin dalam pemerintahan di kadipaten Sumenep dalam kajian Perannya sebagai adipati.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Biografi Raden Asiruddin (Panembahan Sumolo)?
2. Bagaimana Sejarah Berdirinya Kerajaan Sumenep dan Perkembagannya?
3. Bagaimana Peran Raden Asiruddin dalam Pemerintahan di Kadipaten Sumenep 1762-1811 M?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Biografi Raden Asiruddin (Panembahan Sumolo)
2. Untuk mengetahui Sejarah Berdirinya Kerajaan Sumenep dan Perkembangannya
3. Untuk mengetahui Peran Raden Asiruddin dalam Pemerintahan di Kadipaten Sumenep 1762-1811 M

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis

- a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah, khususnya pemerintahan Raden Asiruddin yang menjadi suatu hal yang seharusnya di ketahui oleh masyarakat di Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemerintahan Raden Asiruddin.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat di Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan roda pemerintahan yang tidak sesuai dengan undang-undang negara .
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang partisipasi politik yang sesuai dengan peraturan undang-undang negara.

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritis

1. Teori elit

Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan

pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional.⁸

Secara struktural ada disebutkan tentang administratur-administratur, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara elit fungsional dan elit politik. Yang dimaksud dengan elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalu maupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang Indonesia yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis daripada praktis.⁹

Istilah elit berasal dari kata latin “Eligere” yang berarti memilih. Dalam pemakaian bahasa, kata itu berarti “bagian yang menjadi pilihan” dari barang-barang yang ditawarkan untuk dijual, dan menandakan obyek itu bernilai pilihan. Pengertian yang lebih umum ialah kelompok orang-orang

⁸ Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1948), hal. 12.

⁹ Ibid. Hal. 12

yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat seperti kesatuan-kesatuan militer, kalangan bangsawan atas.¹⁰

Iberamsyah (1988: 16-21) mengemukakan tiga pandangan tentang pengertian elit, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Pandangan Nilai

Pandangan ini mendasarkan diri pada kemampuan elit sebagai suatu kelompok dalam masyarakat yang membentuk atau menciptakan nilai yang diakui dan dihargai tinggi oleh masyarakat. Mereka mengemukakan bahwa elit adalah sebagai suatu kelompok yang terdiri dari mereka yang berhasil menduduki kedudukan dominasi dalam masyarakat, yang disebabkan oleh nilai yang mereka bentuk atau ciptakan mendapatkan penghargaan tinggi oleh masyarakat.

b. Pandangan Struktur

Pandangan ini lebih menekankan pada kedudukan elit pada struktur masyarakatnya. Pakar yang berpandangan ini menyatakan bahwa elit adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang terdiri dari mereka yang menduduki posisi komando pada puncak pranata sosial dalam masyarakat.

¹⁰ Mengutip dari Proposal Tesis Laily Purnamawati, *Pengaruh Politik Terhadap Sikap Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Studi Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Tulungagung, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2009) hal. 13

¹¹ Mengutip dari Disertasi Sumartono, *Peralihan Status sosial Elit Di Pedesaan*, Suatu Kajian tentang Pola dan Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit Pamong Desa (Surabaya: Universitas Airlangga, 1996), hal. 13-14

c. Pandangan Lembaga atau Organisasi

Dalam pandangan ini yang menjadi dasar pembentukan pengaruh dan peran elit adalah lembaga atau organisasi tempat ia berada. Individu atau kelompok dapat menjadi berpengaruh atau berperan karena berada dalam organisasi.

Dhofier (1982: 6) menyatakan bahwa kebanyakan kiai di Jawa tinggal di daerah pedesaan. Mereka merupakan bagian dari kelompok elit. Sebab sebagai suatu kelompok, para kiai mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam masyarakat Jawa. Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa elit adalah sekelompok orang yang mempunyai pengaruh, baik yang bersifat posisional maupun bersifat personal terhadap masyarakatnya.¹²

Walaupun elit juga mempunyai pengaruh social yang penting, akan tetapi untuk membedakan pengertian elit politik dengan kelompok elit, R.D Laswell dalam Sartono Kartodiharjo (1984: 31-32) memberikan batasan elit politik sebagai berikut:¹³

Elit politik meliputi semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik (*body politic*). Pemegang kekuasaan meliputi kepemimpinan

¹² *Ibid.*, hal. 15

¹³ Mengutip dari Proposal Tesis Laily Purnamawati, *Pengaruh Politik Terhadap Sikap Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Studi Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Tulungagung, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2009) hal.18

dan formasi sosial dari mana pemimpin-pemimpin secara tipikal dihasilkan, dan menerima pertanggungjawaban dalam suatu periode tertentu.

Sedangkan kelompok elit meliputi semua anggota pemerintah dan administrasi tinggi, pemimpin-pemimpin militer, dan dalam beberapa hal keluarga-keluarga aristokrasi atau keraton yang berpengaruh, serta pemimpin-pemimpin perusahaan besar yang secara ekonomis kuat.

Bagi masyarakat, kelompok elit politik merupakan pimpinan-pimpinan yang bertanggung jawab terhadap mereka. Namun sebaliknya bagi elit politik, sebagian besar kelompok masyarakat yang bukan pimpinan sering dianggap masih bodoh.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu peneliti telah melacak beberapa skripsi dan buku di antaranya sebagai berikut

Skripsi yang berjudul: “Perilaku dan Tradisi masyarakat Bangsawan di Kelurahan Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep.”¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimana pola kehidupan sehari-hari masyarakat bangsawan di kelurahan Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep dan Bagaimana cara mereka mempertahankan perilaku dan tradisi itu.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 21

¹⁵ Mukhlis, “Perilaku dan Tradisi masyarakat Bangsawan di Kelurahan Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep,” (Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

Hasil dari penelitian tersebut, bahwa masyarakat Sumenep khususnya dikelurahan Kepanjin, sampai saat ini masih begitu besar penghormatan dan penghargaannya kepada keturunan keraton (bangsawan) yang hidup di tengah-tengah mereka. Kewibawaan dan pengaruh para bangsawan ini karena budi luhur perilaku dan tradisinya sehingga dijadikan pedoman dan dianut oleh seluruh masyarakat.

1. Literatur buku

- a. Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta Tokoh di Dalamnya* (Sumenep: Barokah, 2011).

Buku ini menjelaskan sejarah singkat sumenep dan riwayat hidup petinggi Kraton sumenep yang berguna bagi peneliti untuk menjadi acuan sejarah secara lengkap di kabupaten sumenep.

- b. M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008).

Dalam buku ini memaparkan tentang sejarah Indonesia modern tahun 1200-2008 yang bagi peneliti menjadi referensi acuan dalam sejarah-sejarah yang ada di sumenep.

- c. C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Buku ini yang secara komprehensif memaparkan secara detail tentang pasal-pasal, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah

di Indonesia; baik pokok-pokok pengertian pemerintah pusat dan daerah, administrasi pemerintah daerah, serta peraturan-peraturan yang lain.

- d. Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992).

Penambahan atas tulisan dasar-dasar ilmu politik, buku ini sebagai referensi dalam mengetahui ilmu politik terutama yang terpenting bagi para peneliti.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau-pun gagasan di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Metode ini juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.¹⁷

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh menurut Dudung Abdurrahman adalah sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan data)

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindu Persada, 2000), 14.

¹⁷ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1980), 123.

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan obyek penelitian ini, ditempuh melalui dua cara, yaitu:

- a. **Observasi** yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Pengamatan dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung ke Keraton. Pada tanggal 15 maret 2013 saya mengadakan observasi untuk mengetahui kondisi di lapangan akan saya teliti, mula-mula saya mendatangi keraton sumenep yang berada di daerah pajagalan, sesampainya disana saya langsung mendaftar di tempat penerimaan pengunjung atau tamu, setelah itu saya berkeliling di daerah keraton sumenep di temani seorang pemandu, namanya Septiani Rosalina dia sangat membantu saya dalam memaparkan dan memberi tahu tentang seluk beluk keraton sumenep secara detail. Selang beberapa lama kemudian setelah saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan, kemudian saya meninggalkan keraton dan menuju masjid jamik sumenep yang menjadi simbol keberhasilan pemerintahan Raden Asiruddin, betapa takjubnya saya ketika melihat bangunan masjid yang begitu megahnya yang menyimpan sarat akan nilai-nilai sejarah. Ini yang mendorong rasa keingintahuan saya tentang nilai-nilai sejarah terpendam di balik itu semua.
- b. **Wawancara** yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1994), 136.

penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.¹⁹ Dalam hal ini dilakukan interview bebas terpimpin, artinya, pertanyaan-pertanyaan sudah tersusun namun cara penyampaianya masih secara acak. Interview ini ditujukan kepada para pelaku paparaton, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui tentang Raden Asiruddin dan keraton Sumenep tersebut. Adapun hasil wawancara saya dengan salah seorang keturunan raja sumenep yaitu R. Moh. Bagus Ramli sebagai berikut:

Bermula terhadap pengenalan-pengenalan terhadap peninggalan yang ada di kraton dan di jadikan cagar budaya oleh pemerintah. kebanyakan masyarakat kalangan bangsawan di Kabupaten Sumenep bertempat tinggal di perkotaan berdekatan dengan Keraton yang merupakan peninggalan leluhur mereka. Budi perkerti dan pola prilaku kalangan bangsawan masih menganut pada leluhurnya, hal tersebut dapat diketahui dengan sikap dan tatakrama mereka ketika bermasyarakat, baik ketika bertemu dengan masyarakat lain maupun ketika menghormati para tamu yang datang ke rumah mereka.

1. Dahulu masyarakat madura oleh bangsa bangsawan dijadikan anggota militer.
2. Yang melatarbelakangi yaitu kembali kepada perorangan.

¹⁹ *Ibid.*, 193.

3. Ada, karena keberadaan bangsawan masih terlihat ada jelasnya. Apalagi dilihat peninggalan-peninggalan yang masih dilestarikan dan perkumpulan-perkumpulan sesama bangsawannya.
4. Bentuk partisipasi organisasi yang ada di kraton seperti Perfas dan Forsigemas.
5. Pada zaman dahulu responnya sangat positif sekali karna yang memerintah orang-orang kraton sendiri. Sekarang, ada tapi jarang karena rongga untuk memberi keputusan sangat sedikit jadi bisa dibilang nihil.
6. Faktor penghambat, ada karena tidak adanya penerus bangsawan yang menjadi pemimpin.
7. Masyarakat ikut peran serta dalam artian kaum bangsawan mengikut sertakan masyarakat dalam berpartisipasi. Karena bagi masyarakat keturunan bangsawan sangatlah di hormati dan disegani.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah data diperoleh penulis berusaha melakukan kritik sumber yang meliputi kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern untuk menghasilkan tulisan yang memiliki kebenaran isi sumber atau kredibilitas yang tinggi, dilakukan dengan cara membandingkan hasil-hasil tulisan atau informasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, saya mencoba menelaah ulang tentang sumber yang saya peroleh dan membandingkan yaitu Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah*

Sumenep dan Asta Tinggi Beserta Tokoh di Dalamnya (Sumenep: Barokah, 2011). Di dalam buku tersebut dijelaskan tentang peran pemimpin atau raja pada masa lampau memang sangat dominan terutama dalam hal menentukan sebuah keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan pada waktu itu, hal itu di paparkan secara jelas dalam buku tersebut. Menurut saya cukup relevan apabila dibandingkan dengan hasil wawancara saya dengan R. Moh. Bagus ramli di atas.

. Kritik ekstern dilakukan untuk mendapatkan sumber yang otentik dengan melihat siapa yang mengatakan atau menulis sumber tersebut. Setelah melakukan kritik intrern di atas, tentunya saya perlu melakukan kritik ekstern agar memperoleh sumber otentik, sebagaimana yang saya telah paparkan di atas bahwa sumber yang saya peroleh, baik itu dari buku maupun wawancara itu dari keturunan raja-raja sumenep, menurut saya cukup otentik untuk dijadikan sumber penelitian selanjutnya.

3. Interpretasi

Dalam langkah ini, penulis berusaha menafsirkan data yang telah *diverifikasi*. Berdasarkan pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisis sejarah muncul dan berkembangnya keraton Sumenep, dan roda pemerintahan Raden Asiruddin di Kadipaten Sumenep. Berdasarkan sumber yang saya peroleh diatas memang benar adanya, bahwa peran seorang raja atau pemimpin memang sangat kuat dan bersifat monarki dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

4. Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁰ Penulis berusaha menulis data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjadi suatu kisah yang disusun secara sistematis dengan penulisan skripsi saya tulis.

H. Sistematika Bahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, penulis menyusun pembahasannya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang garis-garis besar penelitian skripsi, termasuk di dalamnya mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini akan diungkapkan gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

Bab kedua, menjelaskan tentang Geografi Raden Asiruddin.

²⁰ *Ibid.*, 67.

Bab ketiga, Menjelaskan tentang Sejarah Sumenep yang meliputi, Sejarah berdirinya Kerajaan Sumenep dibawah naungan Singasari dan Majapahit dan kekuasaan Mataram, pemerinthan Arya Wiraraja.

Bab keempat, Menjelaskan tentang peran Raden Asiruddin di dalam pemerintahan kadipaten sumenep tahun 1762-1811 M meliputi: pembangunan Kraton dan Masjid Jamik dan Struktur Pemerintahan Raden Asiruddin

Bab kelima, Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri dari; kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini diharapkan penulis dapat mengambil benang merah dari uraian bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang bermakna.